

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Resolusi konflik di Indonesia masih menjadi masalah yang kompleks dan perlu ditangani secara serius karena berbagai faktor mulai dari historis, sosial, budaya, serta ketimpangan ekonomi dan politik yang masih terus berlanjut. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat beragam dari segi suku, agama, ras, dan golongan (SARA), sering kali menghadapi gesekan antar kelompok yang bisa berujung pada konflik horizontal maupun vertikal (Dharmawan, 2006).

Faktor yang masih sering memicu terjadinya konflik adalah ketidakadilan struktural, seperti kesenjangan pembangunan antar daerah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta lemahnya penegakan hukum. Konflik sering kali juga muncul akibat adanya kepentingan-kepentingan dari sekelompok orang yang ingin memiliki kekuasaan atau *power* terhadap kelompok yang lain. Konflik juga sering kali dipicu oleh tumpang tindih kepentingan dan kebijakan. (Nunkoo & Sungkur, 2021). Meskipun konflik-konflik tersebut telah menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, dan trauma sosial yang dalam, upaya resolusi konflik di Indonesia masih jauh dari memadai. Konflik sering kali tidak diselesaikan secara tuntas, hanya diredam sesaat dengan pendekatan keamanan tanpa menyentuh akar masalahnya. Akibatnya, ketegangan tetap terjadi dan dapat menimbulkan konflik kembali di kemudian hari (Nanang, 2016).

Menyadari kompleksitas dan besarnya dampak konflik sosial, pemerintah Indonesia merespons dengan membuat kebijakan tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Kebijakan ini yang menjadi dasar penting karena untuk pertama kalinya negara memiliki kerangka hukum resmi

dan menyeluruh dalam menangani konflik sosial. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penanganan konflik harus meliputi tiga aspek yaitu mitigasi konflik, penyelesaian suatu konflik, dan pemulihan pasca konflik. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga non pemerintah dalam membangun perdamaian (Sintaresmi et al., 2022).

Namun, meskipun secara normatif UU No. 7 Tahun 2012 telah memberikan arah dan strategi penanganan konflik, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan semangat undang-undang tersebut. Implementasinya masih sering bersifat formalistik dan lemah. Misalnya, upaya deteksi dini terhadap potensi konflik masih minim karena kurangnya data sosial yang akurat atau tidak adanya lembaga khusus yang berfungsi sebagai pusat peringatan dini. Ketika konflik pecah, langkah yang diambil sering kali hanya bersifat represif dengan pengerahan aparat keamanan tanpa proses mediasi yang adil dan transparan (Iqbal Asnawi et al., 2024).

Selain itu, proses resolusi konflik di Indonesia sering kali bersifat jangka pendek, lebih menekankan pada penghentian kekerasan fisik ketimbang mengatasi akar masalahnya. Pendekatan seperti rekonsiliasi formal, mediasi, atau dialog lintas agama memang penting, namun jika tidak dibarengi dengan reformasi struktural dan komitmen politik yang kuat, maka perdamaian yang tercipta bersifat semu dan mudah kembali pecah (Nisa, 2015).

Pentingnya penanganan konflik secara serius juga berkaitan erat dengan stabilitas nasional dan pembangunan. Konflik yang tidak terselesaikan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk hubungan antar komunitas, serta menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, generasi muda

yang tumbuh di lingkungan penuh konflik berisiko tinggi mengalami trauma sosial dan kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi (Dewi et al., 2020).

Indonesia sebagai negara yang besar dengan keanekaragamannya menjadikan hal tersebut sebagai salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya gesekan yang berujung pada suatu konflik. Konflik muncul seringkali karena adanya perbedaan yang selalu ada baik dari individu dengan individu lain bahkan mungkin kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Konflik sudah seharusnya bisa dikelola dengan baik agar kedepannya tidak menghambat tercapainya sebuah tujuan sebuah negara (Fitri, 2025).

Konflik di Indonesia sering kali bersumber dari masalah ekonomi, politik, dan sosial-budaya yang terkait dengan keberagaman suku, agama, dan ras, dan juga masih banyak lagi faktor yang memicu adanya konflik di Indonesia (Nanang, 2016). Dampak negatifnya mencakup perpecahan, kekerasan, kerusakan, hingga hilangnya nyawa, tetapi konflik juga bisa berdampak positif dengan mendorong solidaritas dan partisipasi masyarakat. Penanganan konflik memerlukan upaya pencegahan melalui deteksi dini, dialog, pelibatan masyarakat, dan penguatan peran pemerintah daerah serta aparat keamanan, dengan tujuan mencegah potensi konflik menjadi terbuka dan mengembalikan keharmonisan sosial (Indrawan & Putri, 2022).

Tabel 1. 1

Data Konflik di Indonesia

PROVINSI	JUMLAH PERISTIWA KONFLIK	JUMLAH LUKA-LUKA	POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA	SARA	SENGKETA BATAS WILAYAH	SENGKETA SUMBER DAYA ALAM	DISTRIBUSI SUMBER DAYA ALAM (SDA)
Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0
Papua Barat Daya	1	0	1	0	0	0	0
Papua Barat	2	2	2	0	0	0	0
Papua Tengah	3	7	3	0	0	0	0

Papua Pegunungan	3	11	3	0	0	0	0
Papua	3	27	3	0	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	7	11	7	0	0	0	0
Nusa Tenggara Timur	1	0	1	0	0	0	0
Bali	3	8	3	0	0	0	0
Maluku Utara	6	10	6	0	0	0	0
Maluku	11	73	9	0	0	2	0
Sulawesi Utara	7	3	6	1	0	0	0
Sulawesi Tengah	3	4	3	0	0	0	0
Sulawesi Tenggara	6	1	6	0	0	0	0
Sulawesi Selatan	17	17	16	0	1	0	0
Sulawesi Barat	2	2	2	0	0	0	0
Gorontalo	1	0	0	0	0	1	0
Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0
Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	1	0	1	0	0	0	0
Kalimantan Tengah	2	5	2	0	0	0	0
Kalimantan Barat	2	1	2	0	0	0	0
Jawa Timur	26	51	26	0	0	0	0
D.I.Yogyakarta	6	12	6	0	0	0	0
Jawa Tengah	35	43	35	0	0	0	0
Jawa Barat	40	43	40	0	0	0	0
DKI Jakarta	29	12	29	0	0	0	0
Banten	13	17	13	0	0	0	0
Lampung	3	7	3	0	0	0	0
Sumatera Selatan	7	4	7	0	0	0	0
Kep. Bangka Belitung	5	4	5	0	0	0	0
Kepulauan Riau	2	2	1	0	1	0	0
Jambi	3	9	3	0	0	0	0
Bengkulu	4	12	3	0	1	0	0
Riau	4	4	4	0	0	0	0
Sumatera Barat	1	2	1	0	0	0	0
Sumatera Utara	20	24	20	0	0	0	0
Aceh	2	3	2	0	0	0	0

Sumber : (<https://pelita.kemendagri.go.id>, 2025)

Jika kita melihat data diatas meskipun telah ada peraturan atau regulasi yang mengatur tentang resolusi konflik di Indonesia, faktanya angka terjadinya konflik hingga bulan juli tahun 2025 masih sangat tinggi. Konflik yang ditimbulkan juga dipicu dari beragam faktor penyebab yang melandasi terjadinya konflik. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap implementasi Undang-Undang

tersebut, juga dimungkinkan kurang optimalnya isi dari Undang-Undang yang belum mengatur secara rinci bagaimana proses pencegahan dan penanganan konflik.

Angka yang cukup tinggi ditunjukkan oleh konflik yang berasal dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor politik biasanya terjadi karena perbedaan sudut pandang dan pilihan politik yang nantinya akan menghadirkan gesekan-gesekan pemicu terjadinya konflik. Dari sisi ekonomi juga menjadi hal yang sering kali menimbulkan konflik, ini diakibatkan karena persaingan dagang, angka kemiskinan yang tinggi dan juga masih banyak sekali ketimpangan dan kesenjangan ekonomi. Selain itu ada juga faktor sosial dan budaya keduanya ini tentu saja masih erat kaitannya dengan perbedaan tiap individu yang tentunya memiliki karakter, sifat budaya, dan kepentingan-kepentingan dari tiap individu atau kelompok yang berbeda, sehingga dari perbedaan ini yang biasanya menimbulkan sebuah konflik (Suryahartati et al., 2022).

Daerah yang menjadi salah satu penyumbang angka konflik tertinggi adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2024 di Jawa Tengah konflik sosial tercatat mencapai 27 kasus. Walaupun angka ini turun 8,5 persen dibanding tahun sebelumnya namun angka ini masih cukup tinggi (Immanuel Citra Senjaya, 2025). Sementara di 2025, konflik sosial yang terjadi mayoritas seputar gesekan antar ormas, perguruan pencak silat, hingga pendukung sepak bola. Konflik yang muncul akibat gesekan yang berujung bentrok antar ormas bisa saja dilandasi oleh beberapa faktor penyebab terjadinya konflik (Kurniawan, 2022). Seperti baru-baru ini terjadinya bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA Kabupaten Blora.

Kabupaten Blora merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah bagian timur dengan jumlah penduduk sekitar 925.434 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan dorongan agar indeks pembangunan manusia bisa terus meningkat membutuhkan peran serta masyarakat untuk mendukung segala bentuk kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh pemerintah.

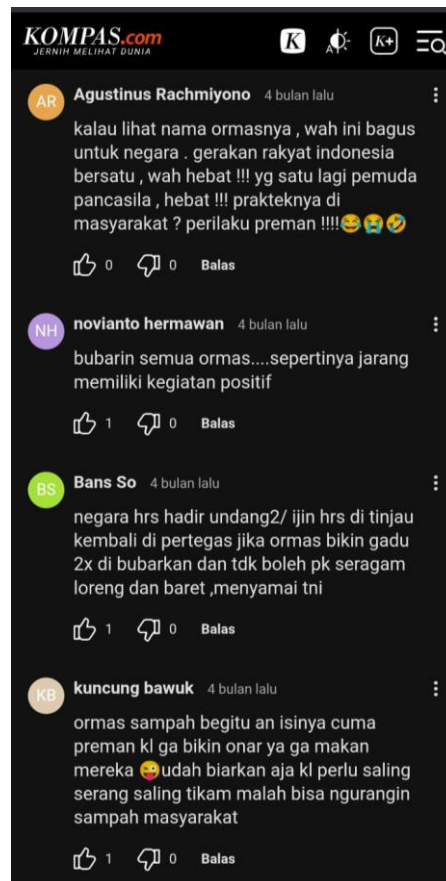
Tujuan hadirnya ormas ini awalnya adalah membantu atau berperan aktif dalam hal kepentingan masyarakat atau publik serta mendorong partisipasi masyarakat agar dapat menjadi kontrol yang baik terhadap sistem pemerintahan (Rinawati et al., 2023). Organisasi masyarakat (ormas) sesuai namanya sudah seharusnya membawa kebermanfaatan yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik. Namun dalam seiring berkembangnya waktu peran *Non Government Organization* yang ada di Kabupaten Blora masih dipertanyakan oleh banyak masyarakat khususnya warga masyarakat Kabupaten Blora. Alasan masyarakat masih mempertanyakan tujuan dan peran serta ormas kepada masyarakat adalah karena banyak sekali ormas-ormas yang peran atau tindakannya sangat berseberangan dengan tujuan adanya organisasi tersebut didirikan (Puspasari Setyaningrum, 2025).

Organisasi masyarakat yang ada seharusnya menjadi contoh yang baik dan menjadi pelindung yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Namun hadirnya ormas-ormas di Kabupaten Blora ini ternyata malah menjadi perbincangan hangat dimasyarakat karena dianggap sebagai organisasi yang tidak ada manfaatnya terhadap masyarakat atau publik (Priyono & Nilamsari, 2021).

Banyaknya ormas yang cenderung memanfaatkan suatu organisasi sebagai wadah untuk bertindak sesuka hatinya dan juga cenderung dianggap meresahkan masyarakat. Anggapan masyarakat terhadap hadirnya ormas ini akhirnya menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang takut dan khawatir akan kondisi yang dimungkinkan akan terjadi karena hadirnya salah satu bentuk *Non Government Organization* di Kabupaten Blora ini.

Gambar 1. 1

Keluhan Masyarakat Atas Penyimpangan Ormas



Sumber : KOMPAS.com (2025)

Gambar di atas adalah suatu gambaran bahwa masyarakat mulai mempertanyakan keberadaan ormas yang dianggap selalu menimbulkan masalah atau konflik sosial. Hal ini sangat tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan

suatu ormas. Masyarakat cenderung menganggap bahwa setiap ormas merupakan sekumpulan orang yang akan melakukan aksi premanisme.

Kondisi sosial yang biasa muncul di tengah masyarakat dianggap diakibatkan oleh keberadaan ormas ini. Salah satu bentuk permasalahan yang baru-baru ini terjadi adalah adanya konflik antar ormas yang membuat kegaduhan di beberapa wilayah terkhusus yang ada di Kabupaten Blora. Konflik antar ormas ini mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan bentrokan yang terjadi antara ormas Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA yang ada di Kabupaten Blora. Konflik yang ditimbulkan dari bentrokan antar ormas ini mengakibatkan beberapa kericuhan yang semakin memanas. Permasalahan ini bermula ketika sekelompok anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Blora yang menggeruduk markas GRIB JAYA Kabupaten Blora. Hal ini mengakibatkan kericuhan di lokasi sekitar dan pada akhirnya kericuhan tersebut sempat diredam oleh aparat kepolisian dan TNI yang langsung berjaga-jaga di lokasi sekitar (*KOMPAS.com*).

Gambar 1. 2

Penggerudukan Markas GRIB JAYA Kabupaten Blora Oleh Ormas Pemuda Pancasila



Sumber : *Tribun Muria.com*(2025)

Peneliti tertarik mengkaji penelitian tentang resolusi konflik dalam konteks administrasi publik. Konflik sosial yang muncul di Kabupaten Blora ini merupakan konflik sosial antar Ormas yang merupakan bagian dari NGO. Penulis tertarik mengkaji hal ini karena konflik yang terjadi merupakan konflik yang cukup kompleks karena dengan adanya konflik yang ada di Kabupaten Blora ini berdampak juga kepada daerah lain. Akibat adanya konflik Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA ini akhirnya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat atau publik yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Terlebih bentrokan tersebut terjadi di beberapa titik di Kabupaten Blora. Hal ini menjadikan isu yang sangat penting mengingat bagaimana strategi atau bentuk penyelesaian konflik yang terjadi pada kasus ini. Oleh karena itu Penulis ingin mengkaji bagaimana resolusi konflik dalam konflik antar ormas yang ada di Kabupaten Blora serta bagaimana peran dari Pemerintah dalam menangani konflik tersebut.

Identifikasi Masalah

1. Karakteristik negara Indonesia yang beragam sehingga rawan gesekan yang mengakibatkan konflik.
2. Masih adanya ketidakadilan struktural, seperti kesenjangan pembangunan antar daerah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta lemahnya penegakan hukum.
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang memicu konflik.
4. Pelanggaran-pelanggaran atau penyelewengan yang dilakukan oleh ormas.
5. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat konflik yang pecah (bentrokan).

1.2 Perumusan masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis menganggap bahwa isu ini menjadi isu yang menarik untuk dikaji utamanya penulis ingin mengidentifikasi beberapa hal antara lain :

1. Mengapa konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA Kabupaten Blora dapat terjadi?
2. Faktor-faktor apa yang melandasi terjadinya konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA Kabupaten Blora?

1.3 Tujuan penelitian

1. Mendiskripsikan dan menganalisis latar belakang terjadinya konflik antara Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA Kabupaten Blora.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA Kabupaten Blora.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat sebagai wawasan atau sumber informasi yang bisa digunakan oleh semua pihak atau kalangan Masyarakat, khususnya dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan dalam meminimalisir potensi munculnya konflik social yang akan terjadi dikemudian hari dan strategi resolusi dalam penanganan konflik antar ormas.

1.4.2 Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan tulisan ini bisa bermanfaat bagi peneliti, pemerintah, dan seluruh Masyarakat.

1. Bagi peneliti

Diharapkan dengan tulisan ini bisa menjadi sarana pengembangan diri penulis agar dalam hal kepenulisan karya tulis dan wawasan lebih meningkat lagi.

2. Bagi pemerintah

Sebagai rujukan dan pedoman untuk mengatasi dan meminimalisir konflik yang mungkin akan terjadi. Selain itu diharapkan dengan adanya tulisan ini bisa menjadi acuan dalam hal manajemen konflik yang ada.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai wawasan luas kepada Masyarakat agar Masyarakat luas mengetahui strategi resolusi konflik yang diambil dalam menangani konflik antar ormas seperti ini.

1.5 Kerangka pemikiran teoritis

1.5.1. Penelitian terdahulu

No	Penulis/ Tahun	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
1.	(Komaling et al., 2018)	Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Menangani Konflik Antar Kampung di Kecamatan Dumog Barat Kabupaten Bolaang Mongondow	Deskriptif Kuantitatif	Terdapat beberapa upaya berbentuk kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dengan bekerjasama dengan beberapa pihak dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dalam penelitian ini sama-sama akan membahas tentang bagaimana cara mengelola dan menyelesaikan konflik namun di dalam penelitian peneliti memiliki lokus yang berbeda yaitu dengan studi konflik antar organisasi kemasyarakatan.
2.	(FAMI, 2018)	Analisis Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan Konflik Sosial (Studi pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung	Kulitatif	Pemberdayaan organisasi masyarakat oleh badan kesatuan bangsa dan politik dalam pencegahan konflik sosial di Kota Bandar Lampung belum berhasil dilaksanakan dengan baik	Penelitian ini berfokus pada pencegahan konflik sedangkan Penelitian peneliti akan lebih membahas tentang bagaimana resolusi konflik yang ada dalam suatu konflik antar organisasi kemasyarakatan.
3.	(Kurniawan, 2022)	Analisis dan Resolusi Konflik antar Ormas di Tanah Abang	Kualitatif	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik	Perbedaanya dengan penelitian ini yaitu

		Jakarta Pusat (Studi kasus : Konflik Antara Ormas Sikumbang dan FKPT		antar ormas Sikumbang dengan ormas FKPT di tanah abang terjadi karena dua faktor, yakni faktor identitas sosial dan faktor ekonomi	terdapat lokus serta bentuk pendekatan teori resolusi konflik yang berbeda.
4.	(Hasiholan, 2016)	Penyelesaian Konflik Antar Organisasi Geng Motor oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung	Kualitatif	Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian konflik antar organisasi geng motor melalui proses manajemen konflik masih terdapat beberapa indikator manajemen konflik yang belum terlaksana seperti klasifikasi masalah dan analisis masalah. Dan juga ditemukan adanya hambatan pada proses penyelesaian masalah. Dimana pihak yang berkonflik menolak upaya penyelesaian konflik secara damai serta keterbatasan personil baik jumlah maupun pengalaman lapangan.	Penelitian ini merupakan penyelesaian konflik antar geng motor dengan menggunakan manajemen konflik sebagai penyelesaiannya. Sedangkan penelitian penulis akan menggunakan studi pada konflik antar ormas di Kabupaten Blora dengan fokus resolusi konflik yang terjadi.
5.	(Saragih et al., 2022)	Analisis Segita SPK pada Kekerasan Langsung antar Organisasi Kemasyarakatan(Ormas)	Kualitatif	Terwujudnya Resolusi Konflik	Dalam penelitian ini terdapat pendekatan yang sama yaitu menganalisis konflik

		Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasila			antar organisasi kemasyarakatan. Tetapi terdapat lokus dan teori yang berbeda dalam penerapannya.
6.	(Rendy Adiwilaga et al., 2023)	Analisis SWOT Strategi Pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam penanganan konflik horizontal organisasi masyarakat di Kabupaten Bandung	Kualitatif	Hasil kajian menunjukkan bahwa dari aspek kekuatan, pemerintah daerah diwakili oleh KESBANGPOL sebagai satuan kerja yang bersentuhan langsung dengan Ormas, yang pertama adalah dukungan dari “sampingan” dalam pembinaan yaitu TNI dan POLRI	Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah dalam menangani konflik horizontal organisasi masyarakat, sedangkan penelitian peneliti akan mengkaji resolusi konflik antar organisasi kemasyarakatan.
7.	(Indrawan & Putri, 2022)	ANALISIS KONFLIK AMBON MENGGUNAKAN PENAHAPAN KONFLIK SIMON FISHER	Kualitatif	Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa konflik di Maluku pecah mulanya karena konflik antar etnis kemudian berkembang menjadi konflik agama Islam dan Kristen.	Penelitian ini lebih terfokus dalam analisis konflik menggunakan teori Simon Fisher sedangkan penelitian peneliti lebih mengkaji tentang resolusi konflik menggunakan teori Ralf Dahrendorf.
8.	(Ramadhani et al., 2025)	Teori Manajemen Konflik	Kuanlitatif	Manajemen konflik yang efektif diperlukan untuk menciptakan lingkungan organisasi yang harmonis dan	Penelitian ini lebih mendalami terkait manajemen suatu konflik sedangkan

				produktif, terutama di sektor pendidikan	penelitian peneliti mengkaji terkait resolusi konflik.
9.	(Suryahartati et al., 2022)	ANALISIS POTENSI KONFLIK DAN PENANGANAN KONFLIK PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI JAMBI BERBASIS GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI)	Kualitatif	Hasil terapat kategori konflik, klasifikasi konflik dan jenis konflik yang ditangani oleh pemerintah melalui tim terpadu	Penelitian ini mengkaji terkait analisis potensi konflik dan termasuk kedalam salah satu mitigasi dan penanganan dengan lokus pada ormas di Jambi, sedangkan penelitian peneliti lebih mengkaji pada resolusi konflik antar ormas di Kabupaten Blora.
10.	(Kondo et al., 2021)	Analysis of recognition of inter-organizational conflict and actions to address it using dependency expressions	Kualitatif	The analysis demonstrated that factors such as the interaction with related parties inside and outside the organization, the project being managed, and the importance of the project have an impact on conflict handling.	Penelitian ini lebih memperdalam terkait analisis pengenalan konflik antar organisasi serta penyelesaian konflik, Sedangkan penelitian peneliti tertuju pada resolusi konflik dengan pendekatan teori resolusi konflik Ralf Dahrendorf dan ditujukan terhadap

					suatu kasus yang terjadi.
11.	(Nunkoo & Sungkur, 2021)	Team conflict dynamics & conflict management: Derivation of a model for software organisations to enhance team performance and Software quality	Kualitatif	Was found that the framework Was successful. This framework Can be Studied By individuals, Taught or applied By a mediator And also another benefit is that individuals are encouraged to express themselves and integrate emotional intelligence.	Penelitian ini mengkaji terkait dinamika konflik serta manajemen konflik dalam suatu organisasi, sedangkan penelitian peneliti akan mengkaji resolusi konflik antar organisasi kemasyarakatan.
12.	(Ariyanto, 2014)	Analyzing the Conflict between Football Organizations in Indonesia	Kualitatif	analyze all discord states, followed by analyzing all possible end results (equilibrium) of the conflict. Previous research showed that some parties were trapped to loselose situation that harmed all involved parties, even though there were other states that provided better payoff	Penelitian ini memiliki terfokus pada analisis konflik antar organisasi sepak bola, sedangkan penelitian peneliti akan mengkaji resolusi konflik antar organisasi kemasyarakatan.
13.	(Shehu-Usman et al., 2024)	Conflict Management Strategies and Organisational	Qualitatif	In light of the study's results, it is recommended that	Penelitian ini mengkaji terkait strategi dan

		Performance: A Study of Federal Roads Maintenance Agency in Abuja, Nigeria		managers consider employing the identified conflict management techniques due to their demonstrated effectiveness in effectively handling conflicts within organizational settings	manajemen konflik suatu organisasi sedangkan penelitian peneliti mengkaji terkait resolusi konflik antar organisasi kemasyarakatan.
14.	(Shabani et al., 2022)	The Impact of Conflict Management Styles on Organizational Performance: A Comparative Analysis	Qualitative	This research contributes to an in-depth understanding of the association of organizational performance with conflict management styles in the private and public sectors of Kosovo. It shows through a comparative approach that organizational performance improves drastically by selecting the appropriate style of conflict management	Penelitian ini mengkaji terkait dampak manajemen konflik terhadap kinerja suatu organisasi sedangkan penelitian peneliti mengkaji terkait resolusi konflik antar organisasi kemasyarakatan.

➤ **Perbedaan Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana resolusi konflik yang terjadi dalam konflik antara ormas Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Konflik dari Johan Galtung dan juga Teori Realistic Conflict dari Muzafer Sherif. Penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana latar belakang konflik ini bisa terjadi beserta faktor-faktor penyebab konflik tersebut. Selain itu penelitian nantinya juga akan menganalisis bagaimana resolusi konflik yang tepat yang akan dijadikan rekomendasi dalam penelitian ini. Jika dibandingkan dengan penelitian lain penelitian ini lebih mengkaji secara spesifik dan terfokus pada identifikasi akar permasalahan konflik hingga rekomendasi resolusi konflik, berbeda dengan penelitian lain yang kebanyakan meneliti terkait manajemen konflik. Penelitian ini juga memiliki lokus yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain sehingga memiliki kebaharuan dalam hal lokus penelitian. Selain itu pendekatan Teori Konflik dari Johan Galtung dan juga Teori Realistic Conflict dari Muzafer Sherif yang akan diimplementasikan dalam penelitian ini cenderung jarang apabila digunakan dalam mengkaji penelitian resolusi konflik antar organisasi kemasyarakatan.

1.5.2. Kajian Teori

1.5.2.1 Fokus Kajian Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam (Keban, 2004) merupakan suatu proses mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya serta anggota/publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi antara seni dan ilmu untuk mengelola kepentingan publik

serta menjalankan berbagai tanggung jawab yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu, Administrasi publik berusaha untuk mengatasi banyak tantangan sosial dengan meningkatkan domain struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan.

McCurdy dalam Keban (Keban, 2004) menambahkan jika administrasi publik bisa dipandang sebagai salah satu metode pemerintahan dalam menjalankan berbagai fungsi negara. Administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan aspek manajemen tetapi juga memiliki dimensi politik. Pandangan ini dapat menimbulkan kebingungan dalam mendefinisikan administrasi publik, termasuk dalam menentukan cakupannya. Hal ini berarti menunjukkan jika keilmuan administrasi publik terus berkembang dan memiliki hubungan yang erat dengan dunia politik.

Chandler dan Plano dalam (Pasolong, 2019) mengungkapkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses di mana sumber daya publik dikelola dan dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan, serta mengawasi kebijakan publik. Administrasi publik merupakan kerja sama antara sekelompok individu atau lembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien (Pasolong, 2019).

Nicholas menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan kombinasi antara teori dan praktik yang bertujuan meningkatkan

pemahaman tentang pemerintahan dan hubungannya dengan masyarakat. Selain itu, administrasi publik juga berfungsi mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Pasolong, 2019).

Chandler dan Plano dalam (Keban, 2004) mengungkapkan bahwa administrasi publik melibatkan proses pengelolaan sumber daya dan personel publik dalam penyusunan serta implementasi kebijakan. Keban juga menyoroti bahwa administrasi publik menunjukkan peran pemerintah sebagai pengatur utama yang memiliki inisiatif dalam membuat kebijakan demi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan ini, masyarakat diasumsikan sebagai pihak yang pasif dan harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sementara itu, Herbert Simon dalam (Pasolong, 2019) menguraikan 4 prinsip dasar administrasi publik, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi administrasi melalui spesialisasi tugas.
2. Memastikan adanya hierarki yang jelas dalam suatu organisasi.
3. Mengoptimalkan efisiensi dengan membatasi jumlah pengawasan dalam suatu sektor.
4. Mengelompokkan pekerjaan berdasarkan tujuan, proses, pelanggan, atau lokasi untuk mempermudah pengawasan.

Menurut Stephen P. Robbins dalam (Pasolong, 2019), terdapat beberapa teori dalam administrasi publik, yaitu:

1. Teori Hubungan Manusia, dikembangkan oleh Elton Mayo, menekankan bahwa norma sosial merupakan faktor utama dalam perilaku kerja individu, bukan hanya insentif finansial.
2. Teori Pengambilan Keputusan, yang mengusulkan penggunaan statistik, model optimasi, simulasi, dan berbagai teknik analisis untuk meningkatkan efektivitas keputusan.
3. Teori Perilaku, yang berfokus pada pemahaman perilaku manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif.
4. Teori Sistem, yang memandang organisasi sebagai sistem yang menerima input, mengolahnya, dan menghasilkan output.
5. Teori Kontingensi, yang menekankan bahwa desain organisasi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan teknologi yang digunakan

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik terus mengalami perkembangan seiring dengan bertambahnya kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan sektor publik. Untuk merespons perubahan tersebut, muncul pendekatan yang disebut sustainable administration. Denhardt & Denhardt mengidentifikasi tiga perspektif utama dalam Administrasi Publik, yaitu Old Public Administration, New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS).

Model administrasi klasik, yang dikenal sebagai Old Public Administration, menekankan pentingnya pemerintahan yang demokratis, efisien, efektif, serta bebas dari manipulasi kekuasaan. Model ini berfokus pada hierarki dalam organisasi pemerintah dan menganggap bahwa pemerintah memiliki peran utama dalam menyusun pedoman serta memberikan layanan publik.

Namun, pendekatan hierarkis ini menyebabkan hubungan yang tidak setara antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kurangnya interaksi serta kerja sama menyebabkan birokrasi publik sering dianggap tidak efisien, tidak produktif, dan kurang inovatif. Kritik terhadap model ini mendorong munculnya gerakan reformasi dalam pengelolaan sektor publik.

Salah satu perubahan besar dalam administrasi publik diawali dengan munculnya New Public Management (NPM), yang dicetuskan oleh Christopher Hood pada tahun 1991. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan model administrasi tradisional yang dianggap tidak cukup fleksibel dalam menghadapi tuntutan masyarakat modern. NPM menekankan prinsip tata kelola yang baik, akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

NPM didasarkan pada asumsi bahwa manajemen pada sektor swasta lebih unggul apabila dibandingkan dengan sektor publik. Maka dari itu, berbagai teknik manajemen swasta, seperti mekanisme pasar, persaingan, dan privatisasi, diterapkan dalam

administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Salah satu ciri utama NPM adalah fleksibilitas dalam birokrasi serta orientasi yang lebih besar terhadap kepentingan masyarakat.

Namun, dalam beberapa situasi, prinsip efisiensi dan ekonomi yang diterapkan dalam NPM tidak selalu dapat digunakan untuk sektor publik, terutama dalam penyediaan layanan sosial dan infrastruktur umum. Pemerintahan modern tidak hanya bertanggung jawab atas efisiensi, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat. Dalam konteks ini, warga negara bukan sekadar konsumen layanan publik, tetapi juga memiliki hak untuk mendapatkan layanan dasar serta menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah.

Meskipun NPM banyak diterapkan, pendekatan ini mendapatkan kritik karena dianggap terlalu menekankan efisiensi dan produktivitas sehingga dapat mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik serta demokratisasi. Sebagai alternatif, J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt pada tahun 2003 mengusulkan paradigma The New Public Service (NPS).

Paradigma NPS berorientasi pada persamaan hak dan keadilan dalam pelayanan publik. Dalam model ini, kepentingan publik tidak ditentukan hanya oleh elite politik, tetapi dirumuskan melalui dialog antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mengakomodasi berbagai kepentingan

masyarakat dan komunitas. Karena masyarakat terus berubah, maka pelayanan publik juga harus bersifat dinamis dan beradaptasi dengan perkembangan sosial.

Meskipun NPS dianggap sebagai paradigma yang ideal dalam mewujudkan keadilan sosial, penerapannya di negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya keuangan. Akibatnya, banyak layanan publik tetap memerlukan kontribusi finansial dari warga negara, sehingga kecenderungan yang terjadi adalah mengadopsi prinsip-prinsip NPM, di mana pemerintah tetap menyediakan layanan publik, tetapi dengan keterlibatan sektor swasta serta pembiayaan dari masyarakat.

1.5.2.3 Manajemen Publik

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue dalam bukunya *Basics Of Management* (2013 : 1), manajemen adalah suatu proses kerangka kerja sistematis yang melibatkan arahan kolektif individu menuju pencapaian tujuan organisasi. Istilah manajemen publik didefinisikan sebagai administrasi entitas pemerintah. Administrasi publik merupakan domain interdisipliner yang meneliti karakteristik menyeluruh organisasi, mengintegrasikan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dengan komponen sumber daya manusia, keuangan, sumber daya fisik, sistem informasi, dan elemen politik. Woodrow Wilson menganjurkan pergeseran segera dalam fokus ilmu administrasi publik menuju metodologi yang diadopsi oleh sektor perusahaan,

secara khusus menekankan peningkatan kualitas personel dalam lembaga pemerintah, serta aspek organisasi dan teknik tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip dasar yang mendukung studi administrasi publik, yang terus mempengaruhi manajemen publik hingga hari ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai konteks utama untuk kegiatan organisasi
- b. Fungsi eksekutif sebagai titik fokus utama
- c. Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi
- d. Metode komparatif sebagai pendekatan metodologis untuk penyelidikan akademis dan kemajuan bidang.

Administrasi publik (Perry dan Kraemer dalam Keban, 2008:100). Dimana terdapat Lima Fungsi Utama Manajemen menurut G.R. Terry dan L.W. Rue yaitu :

1. Planning, yaitu proses identifikasi tujuan yang akan dicapai dan tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan ini.
2. Organizing, yaitu mencakup kategorisasi dan penentuan berbagai kegiatan penting di samping pendelegasian wewenang yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
3. Staffing, yaitu mengacu pada penilaian kebutuhan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, evaluasi, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja yang berkelanjutan.
4. Motivating, yaitu mengacu bimbingan atau arahan perilaku manusia menuju pencapaian tujuan yang ditentukan.

5. Controlling, yaitu evaluasi implementasi terhadap tujuan yang ditetapkan untuk memastikan alasan perbedaan dan untuk memulai tindakan korektif yang dianggap perlu.

1.5.2.4 Manajemen Konflik

Dalam suatu konflik, manajemen konflik mengacu pada kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat dan pihak-pihak di luar konflik. Manajemen konflik adalah suatu proses yang berfokus pada bagaimana individu atau kelompok di luar bisnis berkomunikasi (misalnya, melalui surat tertulis) dan bagaimana mereka memengaruhi interpretasi dan kebutuhan satu sama lain. Se jauh menyangkut pihak ketiga, informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi yang efektif antara berbagai pihak dapat terjadi jika ada rasa percaya di antara individu-individu pihak ketiga (Tualeka, 2017).

Menurut Ross dalam (Tualeka, 2017) manajemen konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para peserta atau pihak ketiga untuk mendapatkan hasil tertentu yang mungkin atau mungkin bukan merupakan hasil dari suatu konflik dan mungkin atau mungkin bukan merupakan hasil dari reaksi yang positif, kreatif, agresif, atau bermufakat. Manajemen konflik dapat melibatkan pengendalian diri, kerja sama tim dalam menyelesaikan masalah (dengan atau tanpa bantuan orang ketiga), atau keputusan oleh orang ketiga. Pendekatan yang berfokus pada manajemen konflik berfokus pada gaya komunikasi (termasuk perilaku) para peserta dan bagaimana mereka memengaruhi pentingnya dan sensitivitas konflik.

1.5.2.5 Konflik & Kekerasan

Konflik adalah serangkaian yang tidak bisa dihindarkan dari interaksi antar individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Cara pengelolaan konflik memiliki keterkaitan yang sangat signifikan terhadap proses organisasi, baik dikelola secara positif maupun negatif (Ramadhani et al., 2025).

Konflik merupakan hal yang pasti akan muncul dalam dinamika sosial di masyarakat. Konflik bisa berakhir pada kerusakan/kehancuran maupun menciptakan keseimbangan sosial. Oleh karena itu diperlukan metode yang tepat agar konflik dapat diselesaikan atau dikelola dengan baik. Cara yang diperlukan untuk mengelola atau mengatasi konflik dibutuhkan teori untuk memahami konflik tersebut (Khaswara & Hambali, 2021).

Dalam menjelaskan konflik, Galtung menggunakan konsep intervensi konflik, dan intervensinya harus netral. Ini merupakan ciri dari pandangan positif, tetapi Galtung menyarankan pendekatan perubahan dalam menciptakan hubungan konflik yang konstruktif (Galtung, 1988). Galtung kemudian menggunakan segitiga konflik. Ia berpendapat bahwa individu, kelompok, dan organisasi membawa kepentingannya masing-masing (Dwi Eriyanti, 2017).

Galtung berpendapat terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan analisis hubungan terkait sebab akibat atau interaksi yang berpeluang untuk menimbulkan konflik sosial. Tiga hal tersebut adalah sikap, perilaku, dan kontradiksi. Sikap adalah persepsi mengenai isu-isu atau permasalahan tertentu yang berkaitan dengan

kelompok lain. Sedangkan perilaku dapat berbentuk Kerjasama, persaingan, atau konflik. Sedangkan kontradiksi adalah situasi dimana sikap dan perilaku terlibat sebagai proses (Khaswara & Hambali, 2021)

Johan Galtung berpandangan bahwa konflik merupakan penyebab dari terjadinya kekerasan dan juga yang menjadi potensi munculnya kekerasan itu, sehingga perang atau tindakan kekerasan menjadi dampak dari adanya konflik. Kemudian Galtung membagi kekerasan menjadi tiga macam, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Dari ketiga macam kekerasan tersebut memiliki dua jenis dimensi, yaitu dimensi langsung (fisik) dan dimensi tidak langsung (non-fisik) (Saragih et al., 2022).

Dalam teorinya, Galtung berpendapat bahwa konflik tidak hanya berupa kekerasan langsung. Namun Galtung memiliki konsep segitiga kekerasan yang membagi kekerasan kedalam tiga jenis, yakni. Pertama, kekerasan langsung, ini adalah kekerasan yang terlihat secara langsung, sehingga kekerasan jenis ini sangat mudah diidentifikasi. Kedua, kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang sistematis dengan berbagai kepentingan yang ada di dalamnya dan bisa juga terjadi karena adanya misi tertentu. Ketiga, kekerasan kultural, adalah kekerasan yang mendukung kekerasan langsung dan struktural karena kekerasan atau pola tersebut sudah menjadi budaya atau kultur yang wajar dan sering terjadi di masyarakat (Saragih et al., 2022).

Cara kerja ketiga bentuk kekerasan tersebut didasari oleh arus kausal yang saling berhubungan dan berpengaruh dari titik satu ke titik lainnya, dimana pemicu siklus kekerasan tersebut bisa bermula dari titik mana saja, baik dari kultural lalu ke struktural sampai ke kekerasan langsung atau sebaliknya (Dwi Eriyanti, 2017).

1.5.2.6 Teori Realistic Conflict

Teori *Realistic Conflict* pertama kali dikembangkan oleh Muzafer Sherif melalui serangkaian eksperimen sosial, salah satunya yang paling terkenal adalah *Robbers Cave Experiment* pada tahun 1961. Eksperimen ini melibatkan dua kelompok anak laki-laki yang ditempatkan dalam situasi kompetisi untuk memperebutkan sumber daya terbatas, seperti hadiah dalam bentuk piala atau status sebagai pemenang (Sherif et al., 1961)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan dalam mencapai tujuan yang saling bertentangan (*zero-sum goals*) secara konsisten melahirkan prasangka, diskriminasi, dan permusuhan terhadap kelompok lain. Hal ini menegaskan bahwa konflik sosial pada dasarnya memiliki akar yang nyata, yaitu adanya perebutan kepentingan terhadap sumber daya yang terbatas, bukan semata karena perbedaan identitas sosial atau budaya.

Lebih jauh, (Sherif et al., 1961) menegaskan bahwa konflik antar kelompok dapat direduksi apabila pihak-pihak yang berkonflik diarahkan pada pencapaian *superordinate goals*, yakni tujuan bersama yang hanya bisa dicapai apabila kedua kelompok bekerja sama. Dengan kata lain, kerja sama dalam kerangka tujuan yang lebih tinggi

memiliki efek menurunkan intensitas prasangka sekaligus meningkatkan kohesi sosial antar kelompok.

Dalam konteks resolusi konflik sosial, teori ini memiliki implikasi penting. Pertama, penyelesaian konflik harus dimulai dari identifikasi kepentingan nyata yang diperebutkan, misalnya akses terhadap lahan, distribusi sumber daya, atau kesempatan ekonomi. Kedua, intervensi resolusi perlu menciptakan program atau tujuan kolektif yang menuntut kerja sama lintas kelompok, sehingga pihak-pihak yang berkonflik terdorong untuk mengalihkan energinya dari persaingan menuju kolaborasi. Ketiga, strategi ini berkontribusi pada pengurangan stereotip negatif dan peningkatan hubungan antar kelompok karena interaksi terjadi dalam kerangka kerja sama yang saling menguntungkan (Ayu et al., 2024).

Dengan demikian, *Realistic Conflict Theory* memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami akar konflik sosial sekaligus menawarkan pendekatan praktis dalam resolusinya. Konflik yang bersumber dari perebutan kepentingan nyata tidak cukup diatasi melalui dialog atau mediasi simbolik, melainkan memerlukan penciptaan kondisi objektif yang memungkinkan semua pihak bekerja sama demi kepentingan bersama yang lebih besar.

Konflik antar organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia kerap kali muncul akibat adanya persaingan untuk memperoleh sumber daya yang terbatas, baik berupa akses terhadap dana bantuan, legitimasi sosial, maupun pengaruh politik. Dalam kerangka *Realistic*

Conflict Theory yang dikemukakan oleh (Sherif et al., 1961), persaingan semacam ini merupakan bentuk nyata dari *zero-sum competition*, di mana keuntungan salah satu pihak seringkali dipersepsikan sebagai kerugian pihak lain. Situasi ini memperkuat identitas kelompok internal (*in-group*) sekaligus memunculkan stereotip negatif terhadap kelompok luar (*out-group*), sehingga berpotensi melahirkan benturan sosial.

Sebagai contoh, beberapa konflik antar ormas di tingkat lokal dipicu oleh perebutan ruang kontrol sosial dan ekonomi, seperti pengelolaan keamanan lingkungan, akses terhadap proyek pembangunan, hingga klaim representasi komunitas tertentu. Ketika sumber daya yang diperebutkan bersifat terbatas, persaingan semakin intens dan memunculkan gesekan yang berujung pada konflik terbuka.

1.5.2.7 Organisasi kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibahas kemudian adalah peran dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung cara hidup yang sehat dan damai. Jelas, organisasi kemasyarakatan Indonesia telah ada sejak awal abad ini dan memiliki rencana strategis terbaik untuk pembangunan negara. Hampir semua organisasi kemasyarakatan yang disebutkan sebelumnya akhirnya menjadi organisasi politik yang mendukung kebangsaan (Amer, 2017).

Istilah "Organisasi Masyarakat" mengacu pada setiap organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat umum, baik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika maupun tidak, dan berfungsi

sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara dan bangsa. Sebagai kelompok orang yang selalu hidup bersama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapainya sendiri (Amer, 2017).

Organisasi kemasyarakatan, sebagai suatu jenis wadah berkumpulnya individu-individu untuk mencapai tujuan tertentu dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia, mempunyai beberapa perbedaan, baik dari kegiatannya sendiri maupun dari bidang fokusnya. Oleh karena itu, sasaran pokok suatu organisasi ditentukan oleh karakteristiknya berdasarkan kriteria yang relevan. Biasanya, organisasi kemasyarakatan harus fokus pada pelayanan, perekonomian, keagamaan, perlindungan, pemerintahan, dan pemberdayaan potensi anggotanya (Winardi, 2017:170).

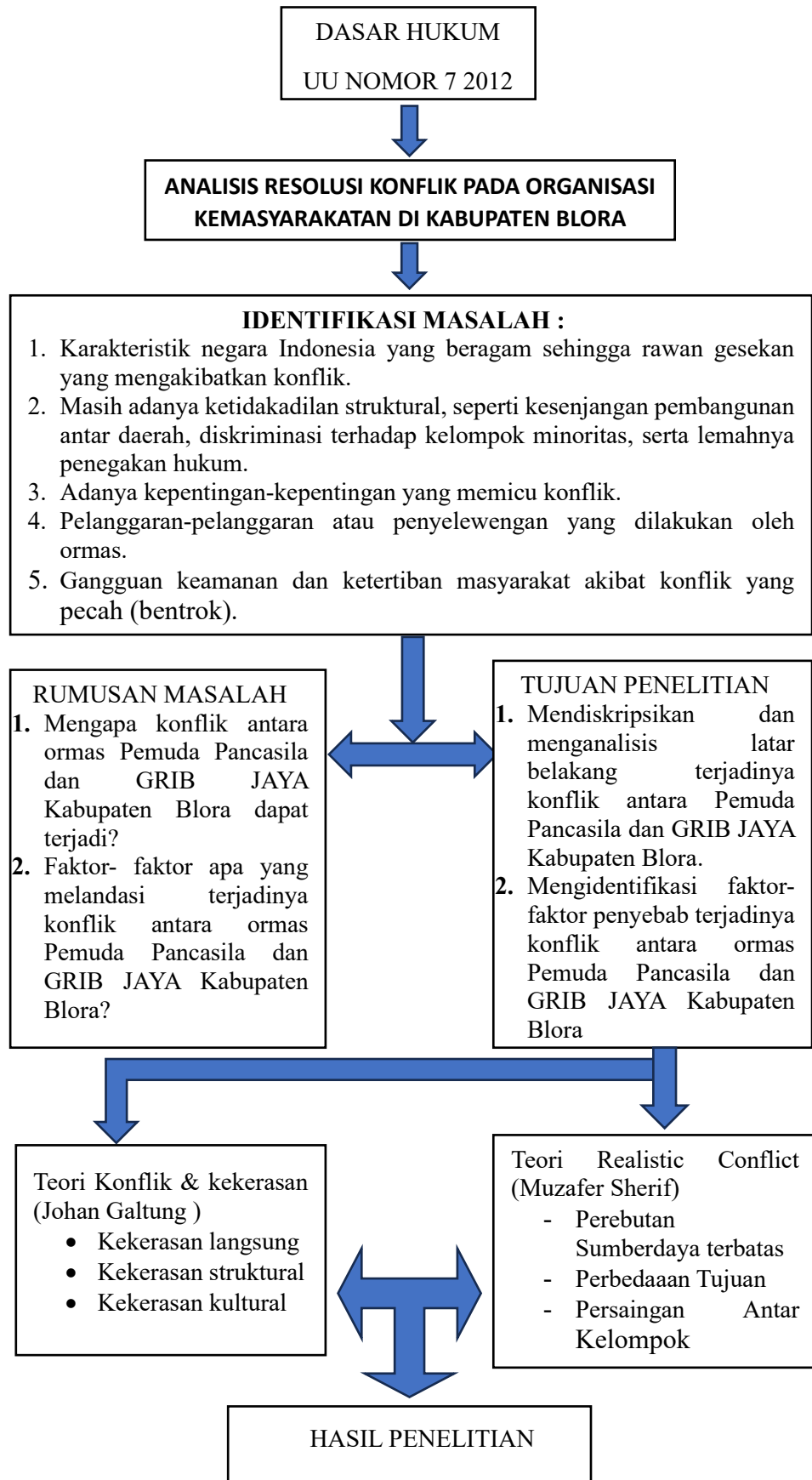
Sebagaimana dengan orientasi tersebut, maka bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan terdiri atas:

1. Lembaga pendidikan tinggi yang berfokus pada organisasi pelayanan. Lembaga ini berkomitmen untuk memberikan bantuan profesional kepada semua anggotanya, termasuk klien.
2. Kelompok masyarakat yang berfokus pada masalah ekonomi (organisasi ekonomi). Lembaga ini menawarkan produk dan layanan sebagai pembayaran dalam format tertentu.
3. Kelompok masyarakat yang berfokus pada aspek keagamaan (organisasi keagamaan). Lembaga ini terlibat dalam kegiatan

yang membantu peserta mengembangkan potensi mereka dalam ibadah dan kegiatan pendukung lainnya.

4. Kelompok kemasyarakatan yang berfokus pada perlindungan anggotanya (protective organization). Organisasi ini memberikan perlindungan kepada anggotanya dari kegiatan atau tindakan lain oleh entitas lain yang mungkin dapat merugikan anggotanya.
5. Organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada kepentingan pemerintah (government organization). Organisasi ini mendukung program pemerintah dalam mengoptimalkan program pemerintah dengan meminimalkan efek atau akibat negatif dari kegiatan yang dilakukan serta hubungan positif dengan program pemerintah lainnya.
6. Organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada kegiatan sosial (social organization). Organisasi ini berfokus pada upaya-upaya penguatan masyarakat non-pemerintah, yang difokuskan pada pembinaan potensi sosial dan aset sosial lainnya sebagai sarana peningkatan modal sosial (Dedi, 2015:619).

1.5.3. Kerangka Penelitian



1.6 Operasionalisasi konsep

Teori	Gejala	Sub Gejala
Teori Konflik & kekerasan (Johan Galtung)	• Kekerasan langsung	➤ penyerangan non fisik yang ditujukan langsung ➤ Bentrokan / fisik
	• Kekerasan struktural	➤ Pelanggaran atas kesepakatan / aturan ➤ Konflik yang direncanakan karena adanya suatu kepentingan
	• Kekerasan kultural	➤ Latar belakang kultural yang berbeda. ➤ Perbedaan karakter
Teori Realistic Conflict (Muzafer Sherif)	• Perebutan Sumber daya terbatas	➤ Perebutan atas penguasaan sumber daya terbatas ➤ Perpindahan anggota
	• Perbedaan Tujuan	➤ Ideologi atau tujuan yang bersebrangan ➤ Selisih paham / kesalahpahaman.

	• Persaingan Antar Kelompok	➤ Keinginan untuk mendominasi. ➤ Kesenjangan antar kedua pihak
--	---	---

1.7 Argumen penelitian

Organisasi Masyarakat adalah salah satu bentuk NGO yang kehadirannya bisa membawa kemanfaatan bagi Masyarakat itu sendiri serta mendorong partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pemerintah agar bisa mencapai tujuan Bersama dalam mewujudkan seluruh tata Kelola pemerintahan (Rahman et al., 2023). Namun ditengah perjalanan ternyata tidak semua tujuan dan arah pandang semua anggota dalam berorganisasi sejalan dengan tujuan didirikannya suatu organisasi kemasyarakatan tersebut. Banyak sekali anggapan atau pandangan dari Masyarakat lingkungan sekitar ormas tersebut yang menilai bahwa ormas tersebut tidak ada dampak positifnya bahkan Masyarakat menganggap bahwa hadirnya ormas tersebut justru merugikan dan meresahkan Masyarakat sekitar (Suryani, 2024).

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengangkat topik / judul penelitian yang menganalisis tentang konflik antara ormas Pemuda Pancasila vs GRIB JAYA yang berada di Kabupaten Blora Jawa Tengah. Baru-baru ini tepatnya pada bulan Januari 2025 terjadi konflik antara kedua ormas tersebut. Dampaknya dari adanya konflik tersebut akhirnya merembet kepada konflik yang lebih besar lagi. Banyaknya massa dari kedua ormas tersebut yang berdatangan ke Kabupaten Blora atas respon dari gesekan yang memicu awal konflik ini terjadi. Pada akhirnya terjadilah bentrokan yang memakan banyak

korban dan memaksa aparat bersenjata dari POLDA Jawa Tengah untuk turun tangan dan berjaga-jaga mengamankan konflik ini (Jamil, 2025).

Dari hal tersebut menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Masyarakat sehingga Masyarakat takut saat ingin keluar rumah. Dari konflik ini membawa dampak yang cukup besar terhadap Masyarakat atau publik sehingga dari konflik tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam terkait latar belakang terjadinya konflik ini dan bagaimana proses resolusi konflik tersebut. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan literatur dalam meminimalisir dan menjadi pertimbangan atas konflik serupa yang dimungkinkan terjadi dikemudian hari (Puspasari Setyaningrum, 2025).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau pernyataan tertulis dari orang-orang dan tindakan yang dapat dipahami. Penelitian kualitatif merupakan hal yang sering ditemui dalam ilmu sosial, karena hal ini didasarkan pada studi tentang manusia dalam lingkungan alamiahnya dan hubungan mereka dengan individu-individu tersebut melalui bahasa dan peristilahannya (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi tempat penelitian tertentu dilakukan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Alasan Kabupaten Blora dipilih sebagai

lokasi penelitian ini karena dalam konteks kasus konflik yang diambil terjadi di Kabupaten Blora. (Mouwn Erland, 2020).

1.8.3 Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan orang atau kelompok yang memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang diteliti, contohnya seperti informan atau narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan data penelitian yang menjadi sampel penelitian. Subjek penelitian dapat memberikan informasi dan memperjelas karakteristik subjek yang diteliti (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Subjek penelitian ini adalah seluruh stakeholders yang terlibat dalam proses konflik hingga penyelesaian konflik yang meliputi:

1. Kepala Bidang Kewaspadaan Dan Penanganan Konflik Kabupaten Blora.
2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas KESBANGPOL Kabupaten Blora.
3. Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Blora.
4. Ketua GRIB JAYA Kabupaten Blora.

1.8.4 Jenis data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu “data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung” (Hadi, 2015: 91). Data kualitatif merupakan bentuk data yang disajikan bukan dalam bentuk angka namun dalam bentuk kata-kata verbal. Salah satu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konflik khas yang terjadi, bersama dengan aktornya dan kronologi konflik yang

sesuai. Data yang digunakan menggambarkan bagaimana konflik terjadi dan bentuk resolusi konflik yang dihadapi berdasarkan temuan dan informasi yang didapatkan oleh penulis.

1.8.5 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif tersusun atas kata-kata dan frasa. Data lain yang digunakan berupa dokumen dan sumber lainnya (Lofland dan Lofland dalam (Mouwn Erland, 2020)). Selain itu, Arikunto (2010:172) menyatakan bahwa "sumber data merupakan pokok bahasan tentang bagaimana data dapat diinterpretasikan." Jadi sumber data merupakan informasi yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan selama penelitian. Kedua jenis data ini digunakan dalam penelitian ini: data primer dan data sekunder.

- a) Sumber data primer, Data ini bisa merupakan hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara mendalam. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan analisis kronologis terhadap seluruh pihak yang berkonflik antara PP dan GRIB JAYA. Sumber data primer ini bisa didukung dengan catatan atau rekaman dari hasil observasi dengan berbagai informan (Andarie, 2019).
- b) Sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Data tambahan yang dikumpulkan dari jurnal lain dan sumber/referensi dari internet (Andarie, 2019).

1.8.6 Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik ini cukup efektif untuk memperoleh data secara langsung yang dapat menilai situasi secara akurat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di lapangan serta mengamati dan mencari informasi dari berbagai pihak yang terlibat (Mouwn Erland, 2020).

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang memfasilitasi komunikasi antara peneliti dan informan. Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis data seperti pandangan, pengalaman, atau pendapat narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan survei kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora, Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, GRIB JAYA Kabupaten Blora, dan masyarakat umum, atau saksi, mengenai konflik yang terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen tertulis, foto, video, atau dokumen lain yang sudah ada. Metode ini cukup berguna untuk menghitung waktu karena data yang dibutuhkan sudah tersedia. Peneliti juga mengumpulkan beberapa dokumentasi dari orang atau sumber mengenai konflik yang ada.

1.8.7 Analisis dan interpretasi data

Menurut Noeng Muhadjir (1998: 104) dalam (Ahmad & Muslimah, 2021) Analisis data adalah bagian dari proses menemukan dan mengganti dengan terstruktur data hasil wawancara, observasi, dan lainnya sehingga peneliti bisa memahami tentang topik yang sedang diteliti. Sehingga dalam upaya meningkatkan pemahaman analisis harus dilanjutkan dengan mencari makna. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis data, yaitu:

- a. Proses pengumpulan data yang mencakup persiapan sebelum pelaksanaan penelitian di lapangan
- b. Pengorganisasian temuan secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh
- c. Penyajian hasil temuan dari lapangan secara jelas dan terstruktur
- d. Mencari dan menetapkan makna temuan secara berkelanjutan hingga tidak ada makna lain yang bertentangan dengan hasil tersebut (Ahmad & Muslimah, 2021).

Sementara itu, interpretasi data adalah tahap memberikan makna dan menentukan signifikansi dari informasi yang diperoleh melalui survei lapangan, eksperimen, laporan penelitian naratif, dan metode lainnya. Interpretasi ini dapat berupa pandangan pribadi peneliti, perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu, penyesuaian dengan teori yang digunakan, maupun pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam tahap selanjutnya. Melalui proses interpretasi ini, data dari wawancara

dan observasi diubah menjadi bentuk teks tertulis yang siap dianalisis lebih lanjut (Untari, 2019).

Menurut (Miles dan Huberman, 1984:12) dalam (Setyadi, 2015) terdapat tiga tahap ketika melakukan analisis data kualitatif, diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data Pada tahap awal pengumpulan data, peneliti memperoleh informasi yang belum diolah atau diproses. Sehingga harus menjalani proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi. Tindakan awal yang dilakukan oleh peneliti melibatkan pengumpulan data yang berasal dari wawancara dan observasi. Pada fase berikutnya, peneliti mengkategorikan dan memeriksa data dari informan yang memberikan jawaban dengan mengekstraksi dan mendokumentasikan informasi terkait yang selaras dengan tema penelitian.
2. Model Data (Data display) Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah pembentukan model data. Model data berfungsi sebagai representasi sistematis data melalui kategorisasi informasi berdasarkan masalah masing-masing. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya ditampilkan dalam format tekstual yang sebagian besar bersifat naratif.
3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan Fase akhir dalam analisis data melibatkan perumusan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti biasanya memulai proses menarik kesimpulan dari

permulaan pengumpulan data, bertahan melalui keseluruhan fase analisis, di mana mereka mengamati keteraturan atau pola yang memfasilitasi munculnya penjelasan, konfigurasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk secara efektif memperoleh kesimpulan pada akhir penelitian..

1.8.8 Kualitas data

Hasil pengumpulan data yang telah dirumuskan selanjutnya di cek kebenarannya dengan menggunakan teknik yaitu triangulasi. Moleong (2011, hlm. 330) menegaskan bahwa “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Widyaningsih, 2016). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan gaya mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya mengumpulkan informasi tentang konflik Pemuda Pancasila dan GRIB JAYA Kabupaten Blora serta bentuk resolusi konflik yang digunakan dalam pengumpulan data (contoh wawancara) dilakukan kepada tiga sumber yang berbeda seperti Kepala KESBANGPOL

Kabupaten Blora, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, Ketua GRIB JAYA Kabupaten Blora dan masyarakat yang terlibat.

1) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari narasumber Kepala KESBANGPOL Kabupaten Blora menggunakan teknik wawancara, lalu kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.